

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

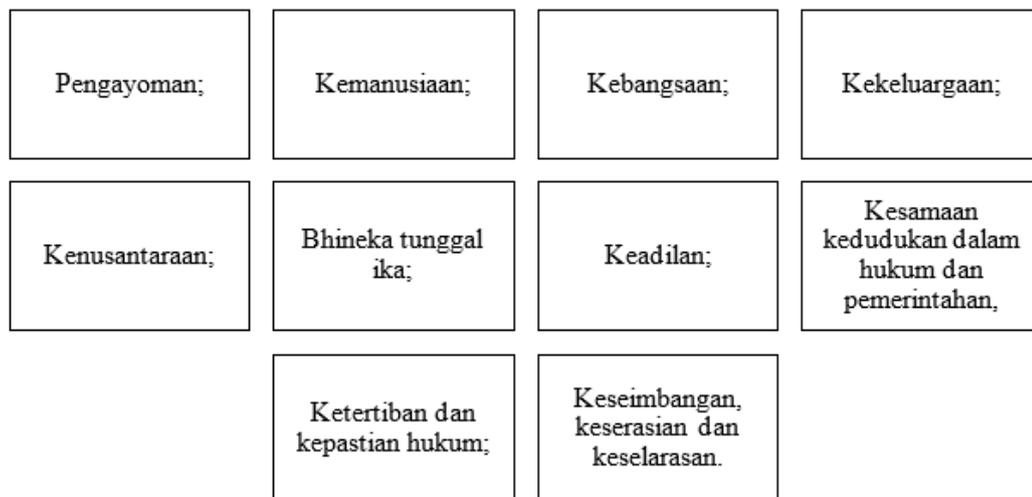
Buku pelajaran merupakan sebuah buku yang digunakan sebagai media pembelajaran bersifat instruksional, dijadikan pegangan oleh peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu dan berkaitan dengan suatu bidang studi, dalam hal ini ialah bidang studi Sejarah Indonesia (Purwanta, Santosa, dan Patrawidya, 2015, hlm. 348). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 buku teks atau buku pelajaran adalah sebuah buku yang dijadikan acuan dengan sifatnya yang wajib digunakan dalam lingkup sekolah yang didalamnya termuat materi pelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan, kepekaan, kemampuan estetis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kepribadian dan budi pekerti, kesehatan, serta potensi fisik yang telah disusun berdasarkan standar nasional pendidikan di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa buku teks sejarah ialah bahan ajar dan sumber pembelajaran yang dicetak untuk digunakan dalam dan disesuaikan dengan kurikulum, berkaitan dengan media pembelajaran, dijadikan pegangan oleh peserta didik untuk mencapai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dalam satuan pendidikan bidang studi sejarah.

Selain memuat unsur pengetahuan, dalam buku teks pun terdapat sumber belajar yang berperan untuk mengembangkan daya kreatifitas dan keterampilan pada diri peserta didik itu sendiri, dengan cara menstimulasi dan memotivasi keaktifan peserta didik dan mampu meningkatkan kualitas pada dirinya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan lebih rinci oleh Mansur Muslich (2010, hlm. 291) mengatakan terdapat enam peranan buku teks yaitu: 1. menyajikan suatu sudut pandangan mengenai suatu pengajaran dan mengungkapkannya melalui bahan pelajaran yang disajikan, merujuk suatu subjek atau pokok permasalahan sesuai kebutuhan dan minat peserta didik berdasarkan program kegiatannya, 2. suatu sumber yang disajikan secara bertahap dan rapi yang memuat masalah-masalah pokok dan berbagai keterampilan, adanya motivasi peserta didik dengan penyajian media dan metode pembelajaran, 3. untuk menunjang tugas praktisi dan berbagai latihan serta adanya penyajian evaluasi. Artinya bahwa sebuah buku teks berperan

sangat penting dalam sebuah pendidikan, selain sebagai sebuah sumber belajar, buku teks pun berperan untuk mendukung kegiatan pembelajaran peserta didik, sebagai buku pendamping dengan sudut pandang penulisnya yang disesuaikan dengan pengajaran, dengan adanya informasi yang disusun secara bertahap dan rapi, adanya latihan, tugas-tugas, remedial, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan, keterampilan, minat bahkan motivasi untuk peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Dalam hal ini buku itu tidak terpengaruh oleh siapapun dan apapun, menceritakan apa adanya, bersifat netral, dan bahkan secara gamblang mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi didalam sejarah dengan disertai berbagai bukti yang ada. Undang-Undang atau peraturan negara yang dijelaskan lebih spesifik yaitu dalam Permendikbud No. 8 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 2 dengan bunyi bahwa buku teks yang digunakan harus memenuhi norma dan nilai positif yang berlaku di masyarakat antara lain tidak memuat unsur bias gender, SARA, kekerasan, radikalisme, paham ekstrimisme, unsur pornografi dan tidak mengandung nilai penyimpangan lain (Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2016). Salah satunya ialah terkait dengan isi dari buku teks tersebut yang menggambarkan gender yang terdapat pada buku teks Sejarah Indonesia kelas XI terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Erlangga. Selain itu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga, terus digalangkan oleh pemerintah, seperti yang tercantum pada Pasal 2 Ayat 2, Permendikbud No. 8 Tahun 2016, dalam hal ini buku teks yang digunakan dalam satuan pendidikan tidak boleh memuat bias gender, meskipun masih adanya kesalahpahaman terkait dengan gender ini dalam kenyataannya (Ulfah, Idawati, dan Sulton, 2019, hlm. 189).

Pemerintah, sekolah dan guru diminta untuk lebih selektif dalam memilih bahan bacaan di sekolah. Selain itu dalam pemerintahan sendiri sudah ada undang-undang yang memuat kesetaraan gender tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tertuang dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut, yang meliputi:



Gambar 1.1. Asas Materi Muatan Kesetaraan Gender

Secara bahasa keadilan yang dimaksud dalam bagan tersebut ialah keadilan yang berasal dari kata adil yang berarti legal, *equitable*, *fair*, dan *just* yang berarti berpegang teguh pada kebenaran dan berpihak pada yang benar (Echols dan Shadily, 2003). Asas keadilan yang tertuang dalam point G dan H bermaksud bahwa adanya keadilan bagi setiap warga negara secara proporsional tanpa terkecuali, kemudian yang dimaksud dengan asas kesamaan dalam pemerintahan dan hukum ialah tidak boleh membeda-bedakan warga negara berdasarkan latar belakang yang dianutnya seperti meliputi unsur gender, agama, suku, ras, status sosial dan golongan yang ada. Artinya bahwa dalam undang-undang tersebut pula tidak boleh adanya unsur diskriminatif, ketidaksetaraan dan ketidakadilan pada siapapun termasuk dalam hal gender dan yang telah termuat dalam undang-undang yang dimaksud. Jadi memang idealnya suatu buku teks tidak boleh mengandung bias gender atau disebut juga dengan pemihakan salah satu jenis kelamin, dan diceritakan setara antara laki-laki dan perempuan yang diatur sesuai dengan negara, yang terdapat dalam Undang-Undang atau peraturan negara

Berbeda dengan kondisi sekarang yang memiliki konsep kesetaraan gender, berarti bahwa adanya bentuk kemitrasejajaran antara kaum laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, masyarakat bahkan keluarga sekalipun, misalnya saja dalam pemerintah Indonesia melalui pembangunan nasional yang meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan yang bertitik tolak pada

gender atau berwawasan gender (Gusmansyah, 2019, hlm. 163). Pada kondisi dan situasi dewasa ini kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangat gencar-gencarnya dilakukan dan diperjuangkan di berbagai negara bahkan di berbagai kalangan terkecil sekalipun, termasuk Indonesia, baik dalam ranah legislatif maupun eksekutif (Gusmansyah, 2019, hlm. 158). Hal ini sesuai dengan pendapat Setianingsih dan Nugroho (2020, hlm. 94) bahwa kembalinya menyuarakan gaung-gaung kesetaraan gender dikarenakan diskriminasi gender adalah diskriminasi yang sering kali muncul dalam lingkup pendidikan. Artinya bahwa kesetaraan berarti pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Perubahan besar yang terkait dengan relasi gender, dituntut dalam era milenium ini, relasi yang menginginkan budaya yang setara dalam peran laki-laki dan perempuan. Tuntutan kesetaraan peran tersebut bisa dipandang untuk meminimalisir keunggulan laki-laki terhadap perempuan dalam pembangunan dan sebagai bentuk keniscayaan yang menyesuaikan tingkat partisipasi masyarakat. Kurikulum 2013, sendiri merupakan terusan dari kurikulum sebelumnya, salah satunya ialah KTSP yang dijadikan landasan operasional, yang memuat kesetaraan gender. Lebih lanjut peraturan pemerintah ini, dituangkan dalam peraturan-peraturan lainnya yaitu dalam Baharun (2017, hlm. 70-74) bahwa implementasi kurikulum 2013 memiliki acuan operasional yaitu dalam pedoman penyusunan KTSP, terdapat tujuan terciptanya kurikulum, salah satunya terkait kesetaraan gender dengan menciptakan pendidikan yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Artinya memang kurikulum 2013, bahkan sejak adanya KTSP ini pendidikan dirancang untuk setara antara perempuan dan laki-laki, tanpa memandang gender yang dianut dalam masyarakat dan ada dalam setiap manusia.

Namun kenyataannya, tidak semua informasi dalam buku teks tersebut dimuat dan tampilkan secara gamblang termasuk dalam hal budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia pada saat itu, yaitu terkait dengan budaya patriarki yang melahirkan garis pemisah gender, hal ini dapat dimengerti karena terkait dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini, dalam hal ini ialah buku teks Sejarah Indonesia. Hal ini didukung oleh pernyataan yang mengatakan bahwa dari buku teks itu sendiri, tidak bisa dilepaskan dari kekuatan politik, ideologis dan budaya yang dominan (Maufiroh dan Lukmana,

2020, hlm. 42-43). Dengan demikian, untuk hal kebebasan buku teks dari dogma dan ideologi, tampaknya sangat sulit untuk dipisahkan karena hal ini terkait dengan kepentingan pemerintah yang berkuasa, jiwa zaman dan kondisi yang ada. Artinya bahwa setiap buku teks, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat objektif dan disesuaikan dengan dogma dan ideologi dari negara Indonesia, memberikan pengetahuan yang lengkap dan tidak menyimpang dalam bidang ilmu sosial, kewarganegaraan dan moral, termasuk buku teks Sejarah Indonesia.

Kenyataannya dalam lingkup dunia, bias gender juga masih dapat ditemukan seperti dalam hal buku teks pelajaran, terdapat bias gender yang dapat dilihat sejak awal tahun 1970 an (Blumberg, 2007, hlm. 33) yaitu stereotip sudah lama atau menjadi tradisi terkait aktivitas dan sifat laki-laki dan perempuan, stereotip gender tradisional aktivitas laki-laki dan perempuan di bidang pekerjaan atau publik dan di ranah rumah tangga atau domestik, penggunaan kata laki-laki yang berarti untuk seluruh umat manusia, dan kurangnya representasi perempuan. Pradana (2017) dalam analisisnya dari buku bahasa Inggris SMP mengatakan bahwa adanya ketidaksetaraan gender di dalam buku teks yang ditelitinya itu yaitu terkait jumlah foto, atau gambar karakter, jumlah karakter perempuan dan laki-laki yang berada dalam buku teks, ketidaksetaraan aktivitas dan pekerjaan antara perempuan dan laki-laki.

Ditambah dengan adanya materi dalam buku teks lebih memprioritaskan laki-laki daripada perempuan, tidak seimbangnnya peran gender yang disediakan dan bahkan adanya stereotip gender atau bias gender dalam buku teks yang kebanyakan ada di Indonesia (Maufiroh dan Lukmana, 2020, 43-44). Maufiroh dan Lukmana (2020, 43-44) mencontohkan dalam penelitian Ariyanto, Damayanti, Ena, Sari, Emilia, Yonata, dan Mujiyanto yang menunjukkan bahwa dalam buku teks ELF, gender direpresentasikan yaitu lebih memprioritaskan laki-laki dibandingkan dengan perempuan, termasuk dalam perannya bahwa kedua jenis kelamin ini diceritakan secara tidak seimbang. Sedangkan dalam buku teks Sejarah Indonesia kelas 10, 11, dan 12 dalam penelitian Briliani (2016) meskipun dalam buku teks tersebut secara keseluruhan sudah memuat adanya unsur kesetaraan gender, akan tetapi masih adanya unsur ketidaksetaraan gender pada perempuan, yang diceritakan dengan adanya kekerasan, stereotip, dan diskriminasi.

Salamah (2014) dalam penelitiannya bahwa gender direpresentasikan dalam buku teks bahasa Inggris yaitu jumlah gambar laki-laki dan perempuan yang didominasi laki-laki, jumlah penyebutan laki-laki dan perempuan yang didominasi perempuan, jumlah peranan perempuan dan laki-laki yang didominasi laki-laki, jumlah permainan antara perempuan dan laki-laki yang didominasi laki-laki, jumlah model laki-laki dan perempuan yang didominasi laki-laki, jumlah pola penyebutan nama perempuan dan laki-laki yang didominasi perempuan. Dalam Sulistyowati (2020) menjelaskan tentang bias gender masih sering ditemukan dalam pembelajaran secara umum, seperti adanya kalimat, dan gambar yang tidak mencerminkan kesetaraan gender, misalnya seorang laki-laki dengan profesi pilot, karena dipandang harus memiliki kekuatan dan kecakapan layaknya laki-laki.

Dalam proses pembelajarannya, di Indonesia sering ditemukan bias gender yaitu ada beberapa bahan ajar yang mengandung bias gender (Kholiza dan Fadhillah, 2021, hlm. 109). Hal ini dikarenakan gender yang sudah mengakar dan gigihnya diskriminasi yang terjadi di sekolah, seperti misalnya adanya stereotip gender di sekolah dan diskriminasi yang dihadapi oleh seorang guru perempuan, (*Global Campaign for Education*, 2012, hlm. 14). Penelitian lebih lanjut dijelaskan oleh Blumberg (2007, hlm. 33) bahwa buku teks mencerminkan kurikulum suatu negara dan sering kali bias gender ini menjadi laten di depan mata dan terkait dengan stereotip juga yang dipatenkan oleh sistem peran gender dan stratifikasi yang diterima begitu saja. Sesuai dengan pernyataan bahwa materi pelajaran bahasa Inggris di Indonesia berdasarkan penelitian Yumarnamto menjelaskan jenis kelamin, usia, antar kelompok, agama, budaya, dan suku sebagai identitas masyarakat dan bangsa Indonesia yang telah di imajinasikan dalam tujuan membentuk nasionalisme (Mulyana, 2021, hlm. 293).

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada penulisan Sejarah Indonesia yang memunculkan sifat gender. Contoh buku teks Sejarah Indonesia yang berkaitan dengan gender baik itu berdasarkan kurikulum 2013 maupun sebelumnya. Yaitu dalam penelitian Sendratari (2014, hlm. 1224) adanya unsur-unsur bias gender yang terdapat di dalam buku teks Sejarah Nasional dan buku-buku Sejarah SMA di Bali, dengan penggambaran yang *androcentric* atau sejarah yang berpusat pada kegiatan kaum laki-laki yang terlihat dalam wacana-wacana bab, gambar-

gambar, bahkan pada latihan atau uji latihan pemahaman yang ada dalam buku tersebut. Artinya bahwa, dalam penulisan buku teks Sejarah Indonesia itu sendiri, ada pula bukti yang memperkuat bahwa dalam penulisannya buku teks sejarah ini ada beberapa yang terkait dengan gender yaitu penggambaran tokoh yang tidak setara.

Menurut Sjamsuddin (2022, hlm. 6-8) seorang peserta didik perlu untuk mengajarkan isu-isu kontroversial dalam pembelajaran sejarah, salah satu isinya yaitu terkait tema yang berhubungan dengan isu, yang berfokus pada gender, hukum, ketertiban, perang, kerja, sumber-sumber langka dalam masyarakat dan distribusinya. Lebih lanjut penulis mengatakan bahwa hal ini bertujuan untuk terbukanya berbagai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fakta beserta dengan penafsirannya, artinya bahwa jika dalam pembelajaran, peserta didik diarahkan untuk mengetahui perkembangan dan hakikat dari berbagai disiplin ilmu dan metode inkuiri atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan bukan hanya pengetahuan yang bersifat deskriptif dari fakta saja tetapi peserta didik dapat memiliki pemahaman yang kompleks.

Tidak sedikit dari buku teks sejarah mengandung kontroversi, seperti yang diungkapkan oleh Purwanto (2009) bahwa di dalam pembelajaran sejarah terdapat kontroversi yaitu sejarah sebagai materi atau bahan ajar, serta sejarah sebagai bagian dari kurikulum yang merupakan hasil dari suatu kebijakan birokrasi dan akademis untuk menyusun pelaksanaan, bahkan perencanaan dari suatu pembelajaran itu sendiri. Yang dimaksud kontroversi dalam buku teks sejarah ialah buku teks yang mengandung pertentangan, persengketaan bahkan perdebatan dalam pembahasan ini, ialah perbedaan antara tokoh laki-laki dengan tokoh perempuan yang dijadikan sebagai representasi gender terhadap sebuah kebudayaan masa kolonial dalam buku teks Sejarah Indonesia kelas XI pada masa penjajahan Belanda sampai mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Terkait dengan gender, bukan hanya ditemukan dalam buku teks sejarah, tetapi juga buku teks lain yang membahas adanya bias gender dalam buku teks Bahasa Indonesia yaitu terkait dengan ilustrasi sosok laki-laki yang lebih banyak, penggambaran salah satu gender yang terpinggirkan dalam ilustrasi, dalam sebuah karangan tokoh laki-laki banyak menjadi sorotan, dan pencantuman karangan yang

ditulis laki-laki juga jumlahnya lebih banyak (Pratama, Tanpa Tahun, hlm. 120). Hal ini didukung oleh buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP dan MTS kelas IX yang bias gender dalam hal penggunaan kalimat atau kata yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan penggunaan kata atau kalimat yang menunjukkan klasifikasi peran dalam hal pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial berdasarkan jenis kelamin (Setianingsih dan Nugroho, 2020, hlm. 93). Penelitian ketiga didukung oleh Kholiza dan Fadhillah (2021, hlm. 207) bahwa dalam buku teks pelajaran Bahasa Arab untuk tingkatan kelas VII MTS masih mengandung bias gender yang dapat ditemukan dalam aspek status sosial, bias gender dalam aspek kegemaran, nilai sifat dan peran kerja.

Penulisan dalam sejarah sangat penting, karena memberikan gambaran bagaimana suatu peristiwa dipahami dan direkonstruksi atau dikaji kembali. Pemahaman dan konstruksi terkait peristiwa sejarah yang khususnya ditulis dalam buku teks pelajaran harus berkaitan dengan tujuan dari pembelajaran yang ada. Sedangkan untuk mata pelajaran sejarah sendiri memiliki tujuan dan kaitan dengan pembentukan watak bangsa, sehingga membuatnya berkaitan dengan ideologi politik negara yang bersangkutan (Mulyana dan Darmiasti, 2009, hlm. 79). Pembentukan watak kebangsaan setiap warganya, bagi negara dipandang sebagai sebuah kewajiban, dan dilakukan melalui pendidikan salah satunya dengan adanya pembelajaran sejarah, yang menjadikan mata pelajaran ini sesuai ideologi bangsanya. Menurut Mulyana (2009, hlm. 9) bahwa tidak akan lepas buku teks pelajaran sejarah dari ideologi bangsa yang diyakini di dalam negara tersebut yaitu dalam pembentukan karakter bangsa, oleh sebab itu pembelajaran sejarah ini dalam menginterpretasikan peristiwa-peristiwa sejarah sangatlah ideologis, terutama pada bagian-bagian tertentu.

Walaupun diperuntukkan sebagai kepentingan pendidikan, kaidah penulisan buku teks sejarah tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan atau rambu-rambu akademik sejarah dengan tetap memperhatikan syarat ilmiah dari ilmu sejarah itu sendiri (Darmawan dan Mulyana, 2016, hlm. 280). Menurut Mulyana (2009, hlm. 7) pada saat penulisan historiografi, peneliti dalam bidang sejarah melakukan suatu penafsiran, merekonstruksi fakta-fakta sejarah yang menjadikannya suatu narasi yang seras makna atau disebut juga *verstehen* dimana

peneliti ini menembus jiwa zaman terkait fakta sejarah yang direkonstruksinya ini. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan Santosa dan Fauzi (2018, hlm 83) bahwa mata pelajaran, buku teks dan kurikulum tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan karena ketiganya saling mempengaruhi. Artinya bahwa buku teks yang dikatakan layak tentu saja harus merujuk pada kurikulum yang saat itu sedang berlaku, hal ini terjadi karena buku teks yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan dari segi pemasaran akan relatif lebih murah karena lembaga formal akan mengikuti pendidikan yang telah diatur oleh pemerintah dan sesuai dengan kurikulum berlaku yang dijadikan rujukan.

Lebih lanjut pembahasan tentang pembelajaran ini, dijelaskan dalam Santosa dan Fauzi (2018, hlm. 80-81) yang mengatakan hambatan yang muncul ketika mengimplementasikan pembelajaran khususnya Sejarah di sekolah ialah penggunaan buku pegangan ini kebanyakan tidak lebih dari satu dan yang berlandaskan pada kepentingan negara akan menjadi pegangan utama, namun hal ini akan mengganggu kekritisian peserta didik; peserta didik hanya mampu menguasai satu buku saja dan tidak memiliki kemauan untuk mencari sumber pembandingnya yaitu berupa buku teks yang sejalan dengan kepentingan negara; dalam pembelajaran sejarah menggunakan sumber buku yang berorientasi pada studi kritis saja, maka tidak tersampaikannya kepentingan negara ini; keterbatasan sumber pembanding yang berbenturan dengan kepentingan negara itu sendiri, dan sebab itulah penerbit lebih mementingkan kepentingan negara dengan alasan banyak konsumen yang membutuhkan dan mudah dipasarkan; keterbatasan kemampuan dari pendidik dalam meramu berbagai bahan perbandingan dan materi dalam buku teks; pendidik terpaku pada SK (Standar Kompetensi) dan SKKD (Standar Kompetensi-Kompetensi Dasar) yang harus disampaikan semua, namun tanpa mampu untuk menggali hal baru.

Dalam buku teks sejarah kelas XI terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan terbitan Erlangga disebutkan bahwa tokoh-tokoh laki-laki begitu mengungguli dalam jalannya cerita sejarah, hal ini berbanding terbalik dengan tokoh perempuan yang relatif sedikit diceritakan dalam buku teks sejarah tersebut, hal ini dipengaruhi karena kebudayaan yang ada pada saat itu, yang menyebabkan dominannya tokoh laki-laki. Artinya pada realitas sosialnya dalam buku teks

tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran berdasarkan dari jiwa zamannya yaitu pada masa kolonial yang lebih menitikberatkan gender, yang melahirkan keadaan tidak seimbang, dimana perempuan menjadi subordinasi dari laki-laki, atau yang disebut juga sebagai ketimpangan gender, bahkan hal ini pulalah yang nantinya akan menjadi penentangan bagi mereka yang menginginkan kesamaan hak dan kewajiban seperti yang digunakan oleh beberapa tokoh dalam sejarah. Seperti yang disebutkan bahwa hal ini terkait dengan budaya patriarki sebagai suatu sistem dari praktik dan struktur sosial, dimana laki-laki mengeksploitasi, menindas dan mendominasi perempuan (Jones, Bradbury, dan Boutillier, 2016, hlm. 229).

Perumpamaan lainnya ialah perempuan direpresentasikan sebagai contoh dari kelompok yang dibelenggu, dalam hal tempat dalam kesempatan hanya dapat mengutarakan gagasannya mereka hanya melalui bahasa para laki-laki. Penekanan feminis pada konstruksi budaya dalam gender, contohnya seperti penekanan pada konstruksi budaya yang ada secara umum, yang telah berdampak besar terhadap praktik sejarah itu sendiri (Burke, 2015, hlm. 75) Dalam sejarah, perempuan masih merupakan hal yang baru, seperti Fatimah (2008, hlm. 385-386) yang menjelaskan bahwa kurangnya penulisan sejarah perempuan yaitu terkait dengan alasan bahwa dalam penulisan sejarah perempuan tersebut, hal ini bertolak belakang dengan tahapan penelitian saat dilakukan pencarian sumber, dan terdapat paradigma tentang sejarah perempuan bahwa mereka ini, ada pada ranah domestik atau rumah tangga, sedangkan ranah publik menjadi urusan laki-laki dengan keilmuannya. Hal ini juga selaras dengan Kuntowijoyo (2003, hlm. 115) mengatakan bahwa penulisan sejarah perempuan digolongkan kedalam kategori penulisan sejarah sosial, atau dapat diartikan dalam lingkup sosialnya seperti dalam urusan rumah tangga atau domestik. Artinya bahwa perempuan berperan dalam ranah sosial yang biasa dianggap sebagai sub marginal atau peminggiran.

Selain adanya unsur patriarki yang dijadikan sebagai sebuah kebiasaan budaya dan adat istiadat saat itu, tak jarang laki-laki pun dianggap sebagai sosok yang maskulinitas yaitu sosok laki-laki jantan yang dihubungkan dengan kualitas yang ada dalam dirinya yang berkaitan dengan seksualitas. Bahkan tak jarang unsur patriarki dan maskulinitas ini juga dikaitkan dengan sebuah kasus kekerasan yang sering terjadi bukan hanya pada masa kini, tetapi jauh sebelum itu yaitu pada masa

kolonial pun, kasus ini bukanlah suatu hal yang asing didengar yang berkaitan dengan patriarki, maskulinitas dan sebuah kekerasan.

Oleh sejarawan, perempuan nyaris tidak tampak dalam artian bahwa pentingnya pekerjaan mereka sehari-hari, dan pengaruh politik mereka pada umumnya terabaikan dan dari sudut pandangan laki-laki biasanya dibicarakan terkait dengan mobilitas sosial. Para sejarawan laki-laki sering mengabaikan pekerjaan perempuan salah satu alasannya ialah karena tidak tampak dan tidak terekam dalam dokumen yaitu hasil-hasil survei pekerja yang dipesan dan dikerjakan olehnya pun adalah pejabat laki-laki (Burke, 2015, hlm. 73-74). Dalam konteks Indonesia, disebabkan oleh adanya fakta bahwa perhatian terhadap segala bentuk sejarah sosial ini sangat langka, oleh sebab itu terjadi ketidakhadiran sejarah perempuan, dan bukan dikarenakan kajian perempuan telah ditelantarkan atau dikesampingkan (Chaerunissa, 2015, hlm 33).

Ketidakadilan gender yang tersosialisasi terhadap kaum laki-laki dan perempuan, maka akan mengakibatkan ketidakadilan tersebut menjadi kebiasaan dan berakhir pada kepercayaan bahwa peran gender itu merupakan sebuah kodrat dan diterima secara umum di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kerancuan dan kesalahan makna dari gender itu sendiri, yang sering kali dianggap sebagai kodrat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Setelah selesai membuat undang-undang tersebut, maka perlu juga untuk memikirkan perihal apa, mengapa dan tujuan dibentuknya suatu perundang-undangan, dan yang tak kalah penting ialah arah dan jangkauan atas peraturan yang akan disusun, dan sasaran yang ingin diwujudkan. Dalam hal ini ialah perihal gender yaitu bentuk peraturan yang responsif gender, dan ketentuan yang netral terhadap gender. Oleh sebab itu setiap kalangan diarahkan agar tidak diskriminatif gender dan responsif gender terhadap salah satu jenis kelamin. Diperlukan alat analisis dalam setiap pembentukan peraturan yang terdapat dalam undang-undang dengan parameter kesetaraan gender yang terdapat empat indikator di dalamnya yaitu: akses, manfaat, kontrol dan partisipasi atau biasa yang dikenal dengan APKM (Ellyaningsih, dkk, 2012, hlm. 39-41).

Alternatif solusi dari permasalahan ini ialah hendaknya suatu buku teks sejarah bersifat objektif sesuai dengan fakta gender yang ada tanpa mengesampingkan ideologi pendidikan yang dianut. Karena kenyataannya bias

gender masih sering ditemukan dalam pembelajaran, seperti adanya kalimat, dan gambar yang tidak mencerminkan kesetaraan gender, seperti yang dapat dilihat dalam penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk menganalisis representasi gender dalam buku teks Sejarah Indonesia kelas XI dengan judul penelitian **Representasi Gender Pada Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XI Kurikulum 2013**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dirumuskan masalah dalam penelitian, dengan rumusan masalah ini yaitu “bagaimana Representasi Gender pada Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XI Kurikulum 2013?”, dan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana representasi gender yang disajikan pada buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI karya Sardiman dan Lestariningsih terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2017 edisi revisi?
2. Bagaimana representasi gender yang disajikan pada buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI karya Hapsari dan Adil terbitan Erlangga tahun 2016 edisi revisi?
3. Bagaimana perbandingan representasi gender pada buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI karya Sardiman dan Lestariningsih terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2017 edisi revisi dan buku teks karya Hapsari dan Adil terbitan Erlangga tahun 2016 edisi revisi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditanyakan di atas, maka terdapat tujuan penelitian dalam hal ini untuk memperoleh temuan mengenai:

1. Mengidentifikasi representasi gender yang disajikan pada buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI karya Sardiman dan Lestariningsih terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2017 edisi revisi
2. Mengidentifikasi representasi gender yang disajikan pada buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI karya Hapsari dan Adil terbitan Erlangga tahun 2016 edisi revisi

3. Mengidentifikasi perbandingan representasi gender pada buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI karya Sardiman dan Lestariningsih terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2017 edisi revisi dan buku teks karya Hapsari dan Adil terbitan Erlangga tahun 2016 edisi revisi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat praktis, yang diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi lembaga pendidikan, dan lembaga penerbit swastra dapat memberikan gambaran bagaimana pengembangan buku teks dengan memperhatikan keseimbangan peran tokoh laki-laki dan perempuan secara faktual dan objektif yang akan bermanfaat bagi masyarakat di masa sekarang dan yang akan datang.
2. Bagi pendidik dan calon pendidik, dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana keseimbangan peran tokoh laki-laki dan perempuan dalam buku teks sejarah sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan dan pengajaran materi sejarah agar lebih objektif.
3. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi sumber tambahan agar penelitian dapat menjadi lebih kompleksitas.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi merupakan sebuah penjelasan yang berisi mengenai gambaran penulisan skripsi yang dirancang dan ditulis oleh peneliti. Pada bagian struktur organisasi skripsi ini, akan terdapat urutan penulisan yang juga menggambarkan urutan kerja peneliti ketika melaksanakan penelitian di lapangan. Penyusunan struktur organisasi skripsi ini juga memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Adapun skripsi ini ditulis oleh peneliti dengan struktur organisasi berupa:

Pada bagian BAB I Pendahuluan ini, peneliti menyusun sebuah pendahuluan penelitian yang terdiri dari A. Latar Belakang Penelitian, B. Rumusan Masalah Penelitian, C. Tujuan Penelitian, D. Manfaat Penelitian, E. Struktur Organisasi Skripsi. Latar Belakang Penelitian merupakan langkah peneliti dalam menganalisis tentang Representasi Gender Pada Buku Teks Sejarah Indonesia

Kelas XI Kurikulum 2013, yang berisi aspek ideal yang jadi fokus penelitian, kenyataan, masalah, dan juga urgensi atau hal yang sangat penting atau urgensi dari penelitian ini. Kemudian, peneliti merancang identifikasi masalah penelitian, yang dilanjutkan dengan Rumusan Masalah Penelitian yang didasarkan atas Latar Belakang Penelitian yang sudah didapatkan, di sini peneliti memuat tiga Rumusan Masalah Penelitian. Penulisan pada bagian pendahuluan ini berikutnya berisi tentang Tujuan Penelitian yang merupakan jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian yang peneliti susun pada bagian Rumusan Masalah Penelitian,. Sementara itu, bagian pendahuluan juga dilengkapi dengan penulisan mengenai Manfaat Penelitian, suatu bagian penulisan yang berisi harapan peneliti mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kalangan-kalangan lainnya selain dimanfaatkan oleh peneliti, dimana dalam penelitian ini terdiri atas tiga manfaat penelitian yaitu untuk lembaga pemerintah seperti dalam bidang pendidikan, penulis buku yang bernaung dengan nama pemerintahan, untuk pendidik dan juga calon pendidik, dan juga untuk peneliti lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dan terakhir, ialah Struktur Organisasi Skripsi yang menggambarkan struktur penulisan yang ada dalam skripsi peneliti.

Bab berikutnya yaitu BAB II, berisi mengenai Kajian Pustaka yang penulis gunakan untuk membantu peneliti dalam menjelaskan berbagai hasil penelitian yang telah ditemukan. Kajian Pustaka, terdiri dari Kajian Sumber dan Penelitian Terdahulu. Pada bagian kajian pustaka ini, terdapat beberapa konsep yang berkaitan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti menetapkan tiga konsep yang akan dijabarkan pada bagian kajian pustaka ini, diantaranya (1) Buku Teks Sejarah; (2) Pembelajaran Sejarah dalam Kurikulum 2013 Revisi 2017; (3) Gender pada Buku Teks Sejarah Kelas XI Kurikulum 2013, yang terdiri dari sub bab yaitu perbedaan gender dan seks, perbedaan maskulin dan feminin, diskriminasi atau bias gender, dan faktor yang melanggengkan dominasi gender, serta teori yang peneliti gunakan dalam skripsi ini yaitu teori wacana stilistika feminisme dan juga teori nurture. Konsep-konsep tersebut, akan peneliti jelaskan dengan menggunakan literatur-literatur yang telah terbit dalam lingkup akademisi, baik itu berupa buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, terbitan pemerintah, makalah atau prosiding atau seminar, dan juga sumber internet. Serta pembahasan

selanjutnya berkaitan dengan penelitian terdahulu, yang terdiri dari dua buku, sembilan artikel jurnal, tiga skripsi, serta satu sumber dari tesis dan disertasi, yang berkaitan dengan materi penelitian yaitu Representasi Gender Pada Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XI Kurikulum 2013.

Pada bagian BAB III ini peneliti menjelaskan Metode Penelitian yang peneliti gunakan, beserta alasan mengapa peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian tersebut. Dalam suatu metode penelitian yang telah peneliti tetapkan, akan berisi tentang: Metode Penelitian, Desain Penelitian, Subjek Penelitian, Fokus Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dengan sub materi yaitu studi pustaka dan studi dokumentasi, Teknik Analisis Data, dan Validasi Data yang memungkinkan untuk peneliti gunakan pada saat penelitian berlangsung.

BAB IV berisi Temuan dan Pembahasan, Dalam bab ini, membahas tentang temuan dan pembahasan, yang secara garis besar dibagi menjadi tiga fokus pembahasan dan berdasarkan rumusan masalah yaitu representasi gender pada Buku Sejarah Indonesia Kelas XI Karya Sardiman dan Lestariningsih Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2017 Edisi Revisi, dan karya Hapsari dan Adil Terbitan Erlangga Tahun 2016 Edisi Revisi, dan perbandingan kedua buku teks tersebut. Temuan yang terdiri dari tabel hasil penelitian dan uraian kutipan langsung dari buku teks Sejarah Indonesia. Sedangkan pembahasan meliputi analisis peneliti terkait temuan, disertai dengan sumber yang relevan, dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada pada bab 2 dan juga adanya teori.

BAB V, berisi Penutup, tentang Simpulan dan Rekomendasi yang sudah berbentuk sintesis argumen baru dari peneliti. Bagian rekomendasi pada bagian ini disesuaikan dengan manfaat penelitian, yaitu diberikan kepada lembaga pemerintah, pendidik atau calon pendidik, dan peneliti-peneliti berikutnya yang memiliki tema penelitian yang cukup serupa atau berkaitan.